

**PENGARUH AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN  
TRANSPARANSI PEMERINTAH TERHADAP  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris pada Kelurahan se-Kota Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:**

**IVANA DIVA CHRISNINDITYA**

**B 200 170 069**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI  
PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Empiris pada Kelurahan se-Kota Surakarta)

**PUBLIKASI ILMIAH**

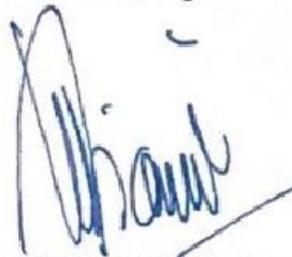
Oleh:

**IVANA DIVA CHRISNINDITYA**  
B 200 170 069

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**Dr. Erma Setiawati, MM., Ak., CA**  
NIDN: 0610106401

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI  
PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Empiris pada Kelurahan se-Kota Surakarta)

**OLEH**

**IVANA DIVA CHRISNINDITYA**  
**B 200170069**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Sabtu, 16 Oktober 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dewan Penguji:**

1. **Dr. Erma Setiawati, M.M., Ak., CA**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Shinta Permata Sari, S.E., M.M.**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si**  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

  
  
**Prof. Dr. Ariton Agus Setiawan, S.E., M.Si**  
**NIDN: 0616087401**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 Oktober 2021



Ivana Diva Chrisninditya

**PENGARUH AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI  
PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris pada Kelurahan se-Kota Surakarta)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dengan menyebarkan kuesioner pada kelurahan di Kota Surakarta. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 120 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi linier berganda dan dianalisis menggunakan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sedangkan variabel efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

**Kata kunci:** akuntabilitas, efektivitas, transparansi, pengelolaan keuangan daerah

**Abstract**

This study aims to analyze and examine the effect of government accountability, effectiveness, and transparency on local financial management. This research is a quantitative research. The sampling technique used in this research is purposive sampling. The data used in this study is primary data by distributing questionnaires to urban villages in Surakarta City. The total sample used in this study was 120 respondents. The data analysis method used is multiple linear regression model and analyzed using the SPSS version 25 program. The results showed that the accountability and transparency variables had a significant effect on regional financial management, while the effectiveness variable had no significant effect on regional financial management.

**Keywords:** accountability; effectiveness; transparency, regional financial management

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), hal yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia yaitu terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, salah satunya dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan umum, pemberdayaan, peningkatan mutu, partisipasi masyarakat dan daya saing daerah.

Sebagai organisasi sektor publik, kinerja instansi pemerintah disorot oleh masyarakat, yang mana pemerintah harus melaksanakan kewajiban dalam upaya pencapaian sasaran atau tujuan instansi yang termasuk dalam visi dan misi pemerintah. Maka, otonomi daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya pada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan mengutamakan kepada rakyat.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Prinsip akuntabilitas adalah setiap pelaksanaan tugas, penggunaan sumber-sumber serta penggunaan kewenangan harus diperiksa baik oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui lembaga independen. Prinsip transparansi adalah semua penyelenggaraan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat umum. Efektivitas berarti penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Hal yang sering terjadi selama ini yaitu menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih kurang efektif dalam berperan sebagai kontributor dalam mendorong laju pembangunan daerah.

Mengingat begitu kompleks pengelolaan keuangan daerah disamping sumberdaya manusianya yang relatif terbatas apabila diukur dari aspek kualitas maka penulis berminat untuk melakukan analisis terhadap variabel-variabel yang menjadi tolak ukur pengelolaan keuangan daerah meliputi akuntabilitas, efektivitas dan transparansi pemerintah dengan melakukan studi kajian pada perangkat daerah khususnya Kelurahan Kota Surakarta. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan responsibilitas perangkat daerah Kota Surakarta untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini merupakan kelurahan di kota Surakarta, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai metode dalam pemilihan sampel penelitian. Tujuan

penggunaan teknik tersebut adalah untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan memperoleh data secara langsung dari sumber asli dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Kontrak pada kelurahan di Kota Surakarta.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah memiliki prinsip-prinsip diantaranya transparan, efektif, tertib, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab.

Menurut Hendra Karianga (2017), Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah dan pemerintah adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang mana pemerintah berfungsi sebagai *public service*, maka pemerintah mempunyai tugas pokok dan fungsi tersendiri dan salah satu kunci penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu persepsi aparatur pemerintah daerah dalam upaya memberikan kejelasan arah. Semakin baik persepsi aparatur pemerintah daerah maka semakin baik pula penyelenggaraan pemerintahan daerah begitu pula sebaliknya.

Akuntabilitas merupakan kinerja dari aparatur pemerintah mulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan mampu melaporkan setiap pelaksanaan program secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Sehingga bisa dikatakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah diberikan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala menyangkut saat sekarang atau masa depan antar individu, kelompok dengan menjelaskan tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui atau ditolak dengan harapan tidak ditemukannya penyalahgunaan kewenangan. Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertanggung jawabkan aktivitas dan pelaksanaan kinerjanya kepada publik. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah

pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Efektivitas yang berasal dari kata efektif dapat diartikan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Pengertian efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Suatu organisasi, program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan mampu memenuhi target yang diharapkan. Apabila tujuan yang dimaksud adalah target suatu instansi maka proses pencapaian tujuan keberhasilan dalam pelaksanaan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas, dan fungsi instansi berjalan dengan baik. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dalam organisasi untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Maka dari itu, efektivitas dalam laporan keuangan dapat melihat bagaimana keuangan dimanfaatkan atau digunakan secara tepat dan memenuhi sasaran.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor. Transparansi yang diartikan sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*). Selain itu, transparansi juga berperan sebagai alat pengendalian atas kinerja yang dilakukan pemerintah. Dalam rangka mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara.

Penting dan perlunya transparansi ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*). Pemerintah yang terbuka dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup. Kedua, perlunya transparansi ini adalah untuk meningkatkan pengawasan masyarakat (*controlling*). Untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan warga perlu disertakan dalam pengawasan, dan pengawasan masyarakat ini akan efektif apabila publik mendapatkan informasi mengenai pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatannya. Ketiga, bahwa publik berhak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk

mengetahui (*right to inform and right to know*).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perangkat daerah memiliki kriteria pada setiap pegawai. Adapun proses dalam penentuan sampel peneliti menetapkan ciri-ciri dan syarat-syarat tertentu sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan, yaitu: memiliki masa kerja minimal satu tahun agar dalam menilai kinerja hasilnya lebih valid, pegawai dalam kelurahan turut berpartisipasi dalam menyusun anggaran, dan pegawai yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yaitu lurah.

Jumlah sampel yang disebar sebanyak 135 kuesioner, kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap sebanyak 15, sehingga penentuan sampel berdasarkan kriteria sebanyak 120 yang dapat diolah.

Pada uji validitas ini, menggunakan metode *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) yang digunakan untuk menguji penegasan dari teori pengukuran. Nilai KMO-MSA sebesar 0,790 yang artinya  $> 0,50$  maka analisis faktor bisa dilakukan.

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan konsistensi dalam suatu konstruk. Instrumen dari variabel akuntabilitas, efektivitas, transparansi, dan PKD dinyatakan reliabel, disajikan pada nilai *Cronbach Alpha* pada variabel akuntabilitas sebesar 0,791, efektivitas sebesar 0,639, transparansi sebesar 0,687, PKD sebesar 0,868 yang mana masing-masing variabel  $> 0,60$  atau lebih tinggi dari nilai standar.

Jumlah sampel yang diolah dari penelitian ini berjumlah 120. Pada variabel akuntabilitas memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 25, nilai mean sebesar 21,99 serta nilai standar deviasi sebesar 2,128 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilai merata dan akuntabilitas perangkat daerah di Kota Surakarta cukup baik. Efektivitas dari 120 sampel diketahui nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum sebesar 40, rata-rata total jawaban sebesar 31,96, serta nilai standar deviasi sebesar 2,495 yang artinya sumber daya yang dikelola perangkat daerah sudah dijalankan dengan baik dan efektif. Transparansi dari 120 sampel diketahui nilai minimum sebesar 27, nilai maksimum sebesar 45, rata-rata total jawaban sebesar 34,99, serta nilai standar deviasi sebesar 3,099 artinya pemerintah cukup baik dalam mengadakan informasi dan akses yang transparan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai minimum sebesar 34, nilai maksimum sebesar 50, nilai mean 42,06, serta nilai standar

deviasi sebesar 3,605 yang artinya pemerintah cukup baik dalam mengelola keuangan dan realisasinya.

Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan *kolmogorov smirnov* yang mana bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Tingkat normalitas data dalam penelitian ini melalui uji kolmogorov-Smirnov Test dengan bantuan SPSS 25 for windows. Hasil penelitian menunjukkan nilai pada baris *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang mana nilai tersebut lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Apabila nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka variabel independen yang digunakan terlepas dari permasalahan multikolinearitas.

Hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa Akuntabilitas memiliki *tolerance* sebesar 0,848 dan VIF sebesar 1,179. Efektivitas memiliki *tolerance* sebesar 0,793 dan VIF sebesar 1,262. Transparansi memiliki *tolerance* sebesar 0,843 dan VIF sebesar 1,187. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF dibawah 10, menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada persamaan regresi.

Analisis hasil output SPSS di atas terlihat bahwa titik-titik bisa dikatakan menyebar di bawah dan di atas angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Maka kesimpulannya variabel bebas di atas tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,186 dengan tingkat signifikansi 0,002 dan diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,98063. Oleh karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,186 > 1,98063$  dan tingkat signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah, maka hipotesis pertama diterima ( $H_1$  diterima). Akuntabilitas pemerintah merupakan kebijakan yang berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Akuntabilitas organisasi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi dan juga mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel efektivitas memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,610 dengan tingkat signifikansi 0,110 dan diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,98063. Oleh karena nilai signifikansi  $> 0,05$  dan perolehan nilai  $t_{hitung}$   $1,610 < t_{tabel}$  1,98063 maka dapat dikatakan bahwa variabel efektivitas tidak berpengaruh terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah, maka hipotesis kedua ditolak ( $H_2$  ditolak). Dalam penelitian ini efektivitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, artinya bahwa efektivitas pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah masih kurang maksimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,093 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,98063. Oleh karena nilai signifikansi  $< 0,05$  dan perolehan nilai  $t_{hitung}$   $6,093 > t_{tabel}$  1,98063 maka dapat dikatakan bahwa variabel transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah, maka hipotesis ketiga diterima ( $H_3$  diterima). Hasil dalam penelitian ini adalah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang artinya pemerintah mampu menerapkan prinsip keterbukaan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya atas tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya yang telah dipaparkan maka dengan ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut, Variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sedangkan variabel efektivitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah karena memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Annisa, V. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru) (*Doctoral dissertation, Riau University*).
- Fahmi, H. (2017). *KEMITRAAN PEMERINTAH DAN NGO/LSM DALAM MENANGANI LIMBAH INDUSTRI BATIK DI KAMPOENG LAWEYAN* (Doctoral dissertation,

Faculty of Social and Political Science).

- Fahri, S. (2020). Akuntabilitas, Efektivitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi pada: Desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen) (Doctoral dissertation, STIE YKPN).
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27.
- Hanafiah, R. R., Abdullah, S. A. S., & Saputra, M. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Di SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(4).
- Handayani, Y. (2015). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi pada 9 Partai Politik di Kota Bandung) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Unpas).
- Kharisma, D., & Yuniningsih, T. (2017). Efektivitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 770-781.
- Ludani, M. M., Tampi, G. B., & Pombengi, J. D. (2015). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan). *JURNAL ADMINISTRASIPUBLIK*, 2(029).
- Manopo, N., Rotinsulu, D. C., & Murni, S. (2019). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 17(2).
- Mujiono, M. (2021). Keefektifan Pembelajaran Klasikal dan Keaktifan Mahasiswa terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Akuntansi Perusahaan Dagang Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2017/2018 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Nababan, R. A., Sihombing, M., & Thamrin, H. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value For Money pada Pemerintah di Kabupaten Dairi. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 4(1), 108-120.
- Nasution, I. Y. M. (2017). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016.
- Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 2(2), 70-75.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Putra, G.,

- Rasuli, M., & Haryani, E. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2016). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Santoso, E. (2011). Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ngawi.
- Suoth, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2016). Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Syahputra, R. A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Pusat).
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.